

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. (2008). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi, Miru. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, Miru. (2014). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, H. Zainuddin. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Kesembilan.
- Badruzaman, Mariam Darus. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Berata, I Komang Oko dan Andriansyah. (2014). *Panduan Praktis Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Djaja S, Meliala. (2008). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. (2018). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Ketiga.
- Gautama, S. (1987). *Pengantar Hukum Internasional Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Purwito, Ali dan Indriani. (2015). *Ekspor Impor Sistem Harmonis dan Pajak dalam Kepabean*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Raharjo, Handri. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Buku Kita.
- R. Setiawan. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.

Salim H.S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim H.S. (2010). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS. (2011). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susilo, Andi. (2013). *Panduan Pintar Ekspor Impor*. Jakarta: Transmedia.

Subekti dan Tjitrosudibio. (1994). *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.

Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cetakan kesembilan.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

Republik Indonesia. (2008). *Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

Republik Indonesia. (1985). *Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319.

Presiden Republik Indonesia. (2002). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227.

Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal*. Berita Negara Tahun 2013 Nomor 283.

Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal*. Berita Negara Tahun 2017 Nomor 733.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Kapal*. Berita Negara Tahun 2021 Nomor 749.

C. JURNAL

Aminah. (2019). Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional. *Diponegoro Private Law Review*. vol 4 No 2.

Bahari, Rifandi. (2021). *Penanganan Dokumen Impor Garmen Pt. Sk Glove Indonesia Di Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) PT. Dinamika Expressindo Semarang Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*. Semarang: Karya Tulis.

Djafar, M. P. H. (2015). *Pembatalan Perjanjian Jual Beli Kapal Barang Menurut Hukum Perdata*. *Lex Privatum*. Vol. 3 No. 3.

Hariyadi. (2019). *Upaya Pemenuhan Kelaiklautan Kapal Serta Pelaksanaan Pengawasan Untuk Menunjang Keselamatan Berlayar Di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Pandan*. Karya Tulis. Semarang.

IMO. (1969). "*International Convention on Tonnage Measurement of Ships*".

Indah, Dwi. (2019). *Analisis Pentingnya Status Hukum Kapal Guna Mewujudkan Keselamatan Pelayaran Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*. (Diploma Thesis, Politeknik Ilmu Pelayaran). <http://repository.pip-semarang.ac.id/2136/1/>.

Ralibi, Achmad. (2017). *Keselamatan Pelayaran Kapal Penumpang Dan Sertifikasi Kapal*. (Skripsi Sarjana, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta). <https://repository.upnvj.ac.id/4170/>.

- Mutia Istikomah Khomaril W. (2021). *Pertanggungjawaban Developer Akibat Wanprestasi Terhadap Pihak Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdara*. (Skripsi Sarjana, Universitas Pasundan). <http://repository.unpas.ac.id/53043/>.
- Nanda, Pranandika Akhmad. (2019). *Prosedur Penanganan Dokumen Kapal Pada PT. Pelni Cabang Semarang*. Karya Tulis.
- Satria, Adiwidia Manggala. (2018). *Upaya Peningkatan Keselamatan Pelayaran Terhadap Kecelakaan Kapal Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Banten*. (Diploma Thesis, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang). <http://repository.pip-semarang.ac.id/871/>.
- Tegoeh, Herman, (2019), *Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal Yang Berkebangsaan Indonesia*, *Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 04 No. 02.

D. INTERNET

- Belajarekonomi, *Bill of Sale: Pengertian, Manfaat, Jenis, Sejarah dan Cara Membuatnya*, <https://belajarekonomi.com/bill-of-sale/>, diakses pada 6 Januari 2023 Pukul 01.50.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,, *Kententuan Barang Kiriman*, <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-kiriman.html>, diakses pada 13 Januari 2023 Pukul 19.50.
- Dirjen Perhubungan, *Informasi Prosedur Pelayanan*, <https://hubla.dephub.go.id/home/informasi-prosedur-pelayanan/766/Pengesahan-Gambar-Kapal>, diakses pada 18 Maret 2023.
- Jurnal Maritim, *Pengaturan Sebuah Bendera Kebangsaan Negara Kapal Dalam UNCLOS 1982*, <https://jurnalmaritim.com/pengaturan-bendera-kapal-dalam-unclos-1982/>, diakses pada 8 Maret 2023 Pukul 15.02.
- Ocbcnisp, *Apa itu MoA? Pengertian, Contoh dan Bedanya dengan MoU*, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/11/15/memorandum-of-agreement>, diakses pada 4 Januari 2023 Pukul 21.05.

Novarino, Sertifikat yang Diterbitkan dan Kaitannya Dengan BKI, <https://koneksea.com/sertifikat-yang-diterbitkan-dan-kaitannya-dengan-bki/>, diakses pada 7 Januari 2023 Pukul 01.23.

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Moh. Muzayin, S.H., M.H., M. Hum., selaku Kepala Bidang Legal dari PT. Gading Cakra Loka, pada 21 Desember 2022.